



# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA NGLANGGERAN DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL

Arifka Brilliana <sup>1</sup>; Mustabsyirotul Ummah Mustofa <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung.

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung.

\*Correspondence : [arifka21001@mail.unpad.ac.id](mailto:arifka21001@mail.unpad.ac.id)

## ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Desa Wisata Nglanggeran, Hak Masyarakat Lokal, Kebijakan, Kesejahteraan.*

Received. :

Revised. :

Accepted :

## ABSTRAK

Desa Wisata Nglanggeran telah berkembang pesat menjadi salah satu destinasi wisata ternama di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan ini tidak lepas dari kebijakan pengembangan desa wisata yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan berbagai pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dalam mewujudkan hak-hak masyarakat lokal dengan menggunakan teori desentralisasi. Adapun teori desentralisasi yang digunakan adalah teori desentralisasi asimetris yang menekankan pada pembagian kewenangan yang tidak sama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan pengembangan wilayahnya, termasuk dalam hal pengembangan desa wisata. Hal ini sesuai dengan konteks Desa Wisata Nglanggeran, di mana masyarakat lokal memiliki peran yang besar dalam pengelolaan dan pengembangan desanya sebagai destinasi wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, diantaranya hak atas kesejahteraan dan hak atas partisipasi. Keberhasilannya menunjukkan bahwa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal, pengembangan desa wisata dapat menjadi lokomotif kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

## ABSTRACT

Nglanggeran Tourism Village has developed rapidly to become one of the well-known tourist destinations in Gunungkidul Regency, Special Region of Yogyakarta. This development cannot be separated from the tourism village development policy that has been implemented by the village government and various related parties. This research aims to analyze the development policy of the Nglanggeran Tourism Village in realizing the rights of local communities using decentralization theory. The decentralization theory used is the asymmetric decentralization theory which emphasizes the unequal distribution of authority between the central and regional governments, by giving greater authority to regions in managing resources and developing their regions, including in terms of developing tourist villages. This is in accordance with the context of the Nglanggeran Tourism Village, where local communities have a large role in managing and developing their village as a tourist destination. The research method used is a descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out through observation,

interviews and documentation. The research results show that the Nglanggeran Tourism Village development policy has had a positive impact on fulfilling the rights of local communities, including the right to welfare and the right to participation. Its success shows that by prioritizing the interests of local communities, the development of tourist villages can become a locomotive for sustainable economic progress.

## Pendahuluan

Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan bergantung pada partisipasi dan dukungan masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia, tradisi, dan budaya desa merupakan daya tarik utama bagi wisatawan (Wearing, 2001). Menurut Nuryanti (1993), desa wisata memadukan atraksi berbasis kehidupan masyarakat pedesaan dengan akomodasi bagi wisatawan. Atraksi ini meliputi tradisi, budaya, adat istiadat, sistem sosial, kesenian, dan kuliner. Fasilitas pendukung desa wisata harus sesuai dengan struktur kehidupan masyarakat pedesaan dan tradisi yang berlaku. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lokal.

Hal yang menarik dari Desa Wisata Nglanggeran ini karena ada lembaga lokal yang bertugas mengelolanya. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran merupakan organisasi lokal. Berbagai penghargaan yang telah diraih Desa Nglanggeran, seperti Desa Wisata Terbaik di Indonesia tahun 2017, Penghargaan ASEAN Community Based Tourism (CBT), Sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2017, dan Desa Wisata Terbaik tahun 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. United Nations World Tourism Organization (UNWTO), menunjukkan Pokdarwis Nglanggeran berhasil memanfaatkan potensi desanya hingga meraih penghargaan internasional. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas prestasi Desa Nglanggeran dalam membina praktik wisata berkelanjutan dan memaksimalkan potensi pariwisata. Desa-desanya lain yang ingin mengembangkan industri pariwisatanya kini bisa mencontohkan Desa Nglanggeran.

Pemerintah Kabupaten, Pokdarwis, dan masyarakat luas semuanya harus terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran. Ini adalah hubungan yang berkembang antara dua orang yang mengambil bagian dalam aktivitas tertentu. Menurut Gary Yukl (1991), hubungan yang harmonis adalah hubungan di mana pihak pertama dan kedua berada pada posisi yang sama, seimbang dan menunjukkan saling menghormati, kerjasama, dan kepercayaan (Yukl & Falbe, 1991). Ketika semua pihak yang terlibat dalam proses bekerja sama dan mengambil bagian dalam mencapai tujuan yang diinginkan, suatu hubungan dianggap berhasil. Sehingga dengan keterlibatan semua pihak, penelitian ini akan meninjau sejauh mana peran kebijakan dalam pengelolaan

Desa Nglanggeran yang melibatkan masyarakat dapat mewujudkan hak-hak masyarakat setempat. Dalam menyikapi permasalahan ini, teori desentralisasi memberikan sudut pandang yang relevan dan signifikan. Tujuan desentralisasi, yaitu

pengalihan kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah lokal, regional, atau negara bagian, adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, efisiensi, dan daya tanggap dalam pemerintahan (Rondinelli, 1983). Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah daerah lebih siap untuk mengelola sumber daya secara efisien dan membuat kebijakan yang sesuai dengan lingkungan setempat karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan tujuan masyarakatnya (Smoke, 2003).

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menyajikan daya tarik wisata yang terintegrasi, meliputi keaslian budaya, tradisi, keseharian masyarakat, arsitektur tradisional, dan tata ruang desa. Daya tarik ini dikemas dalam suatu kesatuan dengan komponen pariwisata seperti atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung. (wikipedia). Pengembangan desa wisata dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk produk wisata, di antaranya pariwisata budaya (*cultural tourism*), ekowisata (*ecotourism*), pariwisata bahari (*marine tourism*), pariwisata petualangan (*adventure tourism*), pariwisata agro (*agro tourism*), wisata gastronomi (*culinary tourism*), dan pariwisata spiritual (*spiritual tourism*). Daya tarik wisata pedesaan ini sengaja dirancang dan dikembangkan oleh para pemangku kepentingan untuk menarik wisatawan agar berkunjung. Komponen terpenting dalam desa wisata, sebagaimana ditegaskan oleh Nuryanti, adalah akomodasi dan atraksi. Akomodasi di desa wisata umumnya memanfaatkan sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat, atau bisa juga berupa unit-unit khusus yang dibangun dengan mengikuti gaya arsitektur lokal. Sedangkan atraksi wisata utama desa wisata adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk desa itu sendiri, beserta latar belakang lokasi desa yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat aktif dalam berbagai aktivitas.

Masyarakat lokal memegang peranan fundamental dalam pengembangan desa wisata. Keberadaan komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan objek wisata menciptakan sebuah sistem ekologi yang saling terkait dan berinteraksi. Timothy (1999) mengidentifikasi dua perspektif utama dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Pertama, partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata di daerah mereka. Hal ini mencakup pertimbangan aspirasi, keinginan, dan tujuan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pariwisata. Perspektif kedua berfokus pada manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Secara umum, partisipasi masyarakat dimaknai sebagai hak fundamental bagi warga negara untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelestarian. Masyarakat bukan hanya objek atau penerima manfaat pasif, melainkan subjek aktif dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat berarti memberikan suara dan pengaruh kepada masyarakat lokal dalam menentukan masa depan daerah mereka yang terkait dengan pariwisata.

Pengembangan potensi desa wisata membutuhkan suatu kerangka kebijakan yang menyeluruh dan terarah. Kebijakan ini mencakup aspek perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan, dengan berlandaskan pada empat asas fundamental: kemanfaatan dan keberlanjutan, kreativitas dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta keadilan sosial dan wawasan lingkungan. Pengembangan desa wisata yang terencana dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa wisata yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. (Noor Rochman, 2016: 64)

## Metode

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pengelolaan desa wisata, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dan detail tentang berbagai aspek yang ada di desa wisata tersebut.

Data penelitian dikumpulkan melalui kunjungan langsung ke Desa Wisata Nglanggeran pada bulan April-Juni 2024. Kunjungan ini dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan para pengurus atau pengelola Desa Wisata Nglanggeran, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang kaya dan komprehensif mengenai pengelolaan desa wisata tersebut.

Wawancara mendalam ini dirancang untuk menggali informasi secara rinci mengenai berbagai aspek pengelolaan desa wisata. Aspek-aspek tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari setiap kegiatan atau program yang dilakukan di desa wisata. Dengan demikian, wawancara mendalam ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana desa wisata ini dikelola dari tahap awal hingga evaluasi.

Selain wawancara, metode observasi juga digunakan untuk melengkapi data penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas dan kondisi di Desa Wisata Nglanggeran, sehingga dapat memberikan data yang lebih akurat dan mendalam. Metode observasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh melalui wawancara dapat diverifikasi dan dilengkapi dengan data lapangan yang nyata.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kebijakan Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran

Desa Wisata Nglanggeran menjadi contoh cemerlang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (bottom-up) yang sukses. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran kelembagaan yang kuat dan sinergis antara berbagai pemangku kepentingan. Lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat di Desa Nglanggeran memainkan peran aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan

pariwisata. Kolaborasi yang erat dengan pemerintah desa ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan berbagai program dan proyek. Sinergitas ini terbukti dalam keberhasilan pengembangan infrastruktur seperti pembangunan embung, yang tidak hanya mendukung ekowisata tetapi juga menjadi atraksi wisata baru. Kekuatan kelembagaan di Desa Nglanggeran ini semakin diperkuat dengan keberadaan kelompok masyarakat yang inovatif dan bertanggung jawab. Hal ini menumbuhkan rasa kepercayaan dari pihak pemerintah, sehingga terjalin kerja sama yang efektif dan saling menguntungkan. Kepercayaan ini membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta melalui program CSR untuk pengembangan wisata desa.

Desa Wisata Nglanggeran telah menunjukkan kemajuan pesat dalam mengimplementasikan konsep ekowisata dalam pengembangan pariwisatanya. Dimulai pada tahun 2008, desa ini menjalani proses yang terencana dan berkelanjutan untuk mentransformasi diri menjadi destinasi wisata yang ramah lingkungan. Konsep ekowisata ini menjadi landasan bagi Desa Wisata Nglanggeran untuk menawarkan pengalaman wisata yang tidak hanya menarik bagi pengunjung, tetapi juga memberikan manfaat bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penerapan ekowisata di Desa Wisata Nglanggeran membawa dampak positif yang signifikan, salah satunya adalah tercapainya manfaat ekonomi secara inklusif. Hal ini berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat desa, tanpa terkecuali, mendapatkan keuntungan dari kegiatan pariwisata. Keuntungan ini berupa peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dan layanan publik.

Pengembangan desa wisata berkonsep ekowisata di Desa Nglanggeran, mengacu pada empat komponen utama yaitu pengembangan objek wisata, kelembagaan, pembangunan industri wisata, dan pemasaran. Keunikan desa wisata ini terletak pada integrasi aspek sosial budaya masyarakat pedesaan, seni budaya lokal, dan karakteristik masyarakatnya dengan daya tarik alam dan ekonomi desa. Hal ini menjadikannya daya tarik wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Objek wisata utama di Desa Nglanggeran adalah Gunung Api Purba Nglanggeran, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Seiring perkembangannya, berbagai atraksi wisata baru berbasis ekowisata telah dikembangkan, seperti embung, wisata air Kedung Kandang, wisata perkebunan, wisata pengolahan hasil perkebunan, dan Kampung Hijau.

Desa Nglanggeran juga telah resmi diakui sebagai Desa Keuangan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Desa Nglanggeran menjadi desa pertama yang mendapatkan predikat tersebut berkat tekad tersebut, yang menunjukkan kinerja pembangunan masyarakat yang luar biasa dan prospek perekonomian yang tinggi. Air Terjun Musiman Kedung Kandang, Nglanggeran Embung, dan aspek terkait pariwisata lainnya menjadi pertimbangan dalam memilih Desa Nglanggeran. Pawon Purba, Griya Batik, Griya Spa, homestay, dan kemungkinan kebun kakao yang diolah di Griya Cokelat Nglanggeran termasuk di antara UMKM yang ada di desa ini. Selain itu, Desa Nglanggeran mempunyai



potensi dalam industri perkebunan, dimana durian dan kakao merupakan produk unggulannya.



Gambar 1 Pawon Purba



Gambar 2 Griya Batik



Gambar 3 Griya Coklat

Sumber: visitigjogja



Gambar 4 Griya Spa



Gambar 5 Homestay

Sumber : Visitingjogja

Sumber : gunungapipurba.com

Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 813,47 juta untuk Desa Nglanggeran hingga tahun 2024. (Antara News, 2 Mei 2024). Dana desa diharapkan dapat membantu kota dalam mewujudkan potensi ekonominya dan mengatasi keterbatasan keuangan. Penggolongan Desa Nglanggeran sebagai Desa Keuangan dimaksudkan untuk menjadi percontohan bagi desa-desa lain yang ingin meningkatkan produktivitas dan memperluas perekonomian lokalnya. Desa Nglanggeran menunjukkan bagaimana desa dapat memacu pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat jika dikelola dengan baik. Tujuannya, dengan terciptanya Desa Keuangan, maka Desa Nglanggeran dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya, meskipun manfaatnya tidak akan langsung terasa. Hal ini diperkirakan akan mengarah pada terciptanya lebih banyak komunitas dengan pengelolaan keuangan yang kompeten dan pembangunan ekonomi yang maksimal.

## 2. Peran Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dalam Mewujudkan Hak-hak Masyarakat Lokal

Bagi masyarakat setempat, pengaruh dari kebijakan Desa Nglanggeran memberikan dampak sosial yang positif seiring berkembangnya potensi sebagai

destinasi pariwisata. Pendapatan masyarakat dari industri pariwisata kini menambah pendapatan masyarakat yang sebelumnya hanya terbatas pada sektor peternakan dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Desa Nglanggeran dapat diturunkan dengan banyaknya prospek lapangan kerja baru. Perkembangan sektor pertanian terlihat dari kemampuan masyarakat Desa Nglanggeran dalam membudidayakan buah kelengkeng dan durian karena adanya perairan buatan berupa waduk Nglanggeran. Selain itu, industri pariwisata sedang berkembang, dengan semakin banyak orang mulai mendirikan homestay untuk wisatawan dan toko oleh-oleh.

Keberhasilan desa ini berawal dari inisiatif warga desa yang melihat peluang dari meningkatnya kunjungan wisatawan ke Gunung Api Purba setiap akhir pekan. Pada tahun 2007, pemuda desa melalui karang taruna mulai mengelola desa wisata secara swadaya, meskipun masih terbatas pada penarikan parkir pengunjung. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang lebih profesional mendorong pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tahun 2008. Terobosan signifikan terjadi di tahun 2011 dengan diperolehnya bantuan dana melalui program PNPM pariwisata. Dana ini digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana desa wisata, yang berakibat pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Upaya promosi yang gencar, termasuk mengikuti kompetisi desa wisata, turut melambungkan nama desa wisata Nglanggeran. Inovasi dan pengembangan pariwisata di desa ini berpusat pada masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan desa wisata Nglanggeran.

Pada tahap awal pengembangan, Desa Wisata Nglanggeran bertindak sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat non-inisiator untuk berpartisipasi dalam gotong royong membangun infrastruktur pariwisata. Peran desa kemudian berkembang dengan membantu desa mendapatkan alokasi dana dari PNPM dan Dana Desa untuk pengembangan inovasi di desa. Sejak tahun 2012, ketika desa wisata telah mencapai tahap established dan jumlah wisatawan meningkat pesat, peran desa menjadi lebih beragam, meliputi pembangunan fasilitas baru dan pemeliharaan aset wisata. Pemerintah Desa Nglanggeran menyadari pentingnya infrastruktur pariwisata yang memadai bagi kenyamanan dan daya tarik pengunjung. Oleh karena itu, fokus utama desa adalah pada perbaikan dan pembangunan fasilitas yang ramah pengunjung. Selain itu, desa juga menunjukkan komitmen yang patut diapresiasi dalam hal pemeliharaan aset, yang seringkali diabaikan namun menjadi kunci keberlangsungan pariwisata. Selain itu juga melalui pendanaan karena dedikasi desa terhadap pengembangan pariwisata dibuktikan dengan alokasi dana desa untuk mendukung pengembangan pariwisata. Dana ini tidak hanya digunakan untuk infrastruktur, tetapi juga untuk aspek teknis pengelolaan pariwisata.

Desa memiliki peran strategis dalam pengembangan desa wisata, tidak hanya sebagai penyedia destinasi wisata, tetapi juga sebagai fasilitator berbagai pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat lokal. Pelatihan tersebut mencakup

berbagai aspek pengelolaan pariwisata, mulai dari strategi pemasaran, pemeliharaan fasilitas wisata, hingga pelatihan menjadi pemandu wisata dan membangun interaksi yang efektif dengan pengunjung. Dalam melaksanakan tugas fasilitasi ini, desa menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi (misalnya UGM), dan lembaga lainnya seperti Bank Indonesia. Dukungan administratif dan regulasi yang memadai menjadi landasan penting bagi pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan.

Desa berperan aktif dalam penunjukan pengelola desa wisata, terutama pada tahap awal pembentukannya. Selain itu, desa juga terlibat dalam penyusunan regulasi terkait desa wisata melalui peraturan desa. Perencanaan pembangunan desa wisata dilakukan secara demokratis dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta yang menjadi sektor unggulan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan perencanaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten turut berperan dalam pengembangan desa wisata, meskipun tidak secara langsung dalam proses inovasinya. Peran pemerintah kabupaten meliputi aspek sarana prasarana, pendanaan, dan pelatihan.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Lokal**

Desa Nglanggeran menjadi contoh nyata bagaimana pariwisata, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat dapat bersinergi untuk memajukan dan mensejahterakan suatu desa. Keberhasilan desa ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana potensi desa dapat dioptimalkan dengan tepat. Pemenuhan hak-hak masyarakat lokal dari pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dilandaskan pada beberapa faktor, di antaranya:

#### **1. Potensi Lokal yang Unik**

Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terbukti memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat desa. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan yang signifikan dalam berbagai sektor mata pencaharian, seperti pedagang, pekerja jasa pariwisata, dan sektor lainnya. Lebih lanjut, pengembangan desa wisata ini membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar sektor pertanian yang selama ini menjadi mata pencaharian utama.

Secara rinci, manfaat ekonomi pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, seperti peningkatan omzet penjualan bagi para pedagang dan penghasilan tambahan bagi pekerja di sektor pariwisata. Dampak tidak langsung terlihat dari meningkatnya nilai jual tanah di desa, yang dapat menjadi peluang investasi bagi masyarakat.

Desa Nglanggeran terkenal sebagai penghasil kakao berkualitas tinggi. Dengan luas perkebunan kakao mencapai 10,2 hektare dan dikelola oleh 96 warga, desa ini



mampu memproduksi 1,5 - 2 kuintal biji kakao per bulan. Hal ini menjadikan kakao sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat Desa Nglanggeran. Pengembangan Desa Nglanggeran sebagai tujuan wisata sama pentingnya dengan keberhasilan desa tersebut seperti halnya produksi pertanian kakao.

## 2. Inovasi Masyarakat yang Didukung Pemerintah dan Lembaga Swasta

Penggunaan konsep homestay di desa ini memungkinkan pengunjung tinggal bersama penduduk setempat dan merasakan kehidupan desa yang sesungguhnya. Menurut Bonai Subiakto, Direktur Keuangan dan Operasional PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, sejak tahun 2019, SMF telah mengucurkan pembiayaan sebesar Rp1,57 miliar untuk pembangunan 24 unit homestay di Desa Nglanggeran. Selain pendanaan untuk homestay, SMF juga mendukung infrastruktur desa, seperti pembuatan sumur untuk 87 keluarga. Pembiayaan homestay SMF telah terbukti meningkatkan taraf hidup dan perekonomian warga Desa Nglanggeran. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pesat jumlah kunjungan pengunjung domestik dan internasional, yaitu sebanyak 379.024 pada tahun 2019 hingga 2023.

## 3. Penghargaan dan Pengakuan

Berbagai penghargaan yang diterima Desa Nglanggeran dalam skala nasional dan internasional semakin memperkuat keberhasilannya. Pada tahun 2019, salah satu homestay Nglanggeran binaan SMF mampu membawa pulang Penghargaan Homestay Terbaik Provinsi DIY Yogyakarta. Pada puncaknya, Desa Nglanggeran mampu mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata unggulan ketika diakui sebagai pemenang Desa Wisata Terbaik 2021 (UNWTO) Organisasi Pariwisata Dunia. Dedikasi BUMN ini dalam membantu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan industri pariwisata tanah air ditunjukkan dengan upaya SMF dalam mewujudkan Desa Wisata Nglanggeran. Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, memuji Desa Nglanggeran atas keberhasilannya memadukan pariwisata dan pertanian kakao. Dirinya mengklaim komunitas ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia yang ingin mewujudkan potensinya. Desa Nglanggeran menunjukkan bagaimana pariwisata dan pertanian dapat menggerakkan perekonomian desa yang berkelanjutan dalam kondisi yang tepat. Diharapkan masyarakat lain dapat termotivasi untuk menggunakan kemampuan kreatif dan inovatifnya untuk berkembang berkat keberhasilan desa ini. (Bisnis.com, 3 Mei 2024).

## 4. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengaruh kontribusi ibu-ibu terhadap kelompok usaha Griya Coklat juga patut diapresiasi. Griya Cokelat Nglanggeran (GCN) Desa Nglanggeran merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang khusus memproduksi olahan coklat bubuk. Proses pembuatan coklat melibatkan pengolahan biji kakao menjadi berbagai macam produk, antara lain coklat batangan, coklat bubuk sachet, pisang

berlapis coklat, dodol coklat, dan masih banyak lagi. Diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2016, perusahaan ini telah memiliki PIRT, izin BPOM, dan Sertifikat Halal dari MUI untuk produknya. Di Kawasan Ekowisata Gunung Api Nglanggeran, potensi lokal berupa kakao dioptimalkan oleh lima kelompok tani dan satu gabungan kelompok tani. Pengembangan Gerakan Cokelat Nusantara (GCN) difokuskan pada penyediaan produk pangan berbasis coklat sebagai oleh-oleh unggulan. Hal ini selaras dengan Saputro & Dawud (2021) yang menyatakan bahwa sektor pariwisata memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran. Dampak positif tersebut meliputi peningkatan penghasilan masyarakat Desa Nglanggeran dan peningkatan peluang kerja serta usaha bagi masyarakat lokal di sektor pariwisata. Selain itu, adanya peraturan lokal yang membatasi investasi asing turut berkontribusi pada peningkatan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal atas sektor pariwisata. Hal ini juga meningkatkan rasa bangga masyarakat untuk bekerja dan berusaha di desanya sendiri.

Tidak hanya itu, pendapatan pemerintah daerah juga mengalami peningkatan melalui retribusi wisata. Penelitian ini tidak menemukan indikasi dampak negatif terhadap ekonomi lokal, seperti kenaikan harga barang. Kesimpulannya, pengembangan desa wisata Nglanggeran cenderung membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, pengembangan desa wisata yang mengutamakan kepentingan masyarakat lokal sebaiknya dilanjutkan secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Nglanggeran dan memastikan bahwa keuntungan dari pariwisata dapat dinikmati oleh komunitas lokal secara adil dan berkelanjutan.

### Referensi

- Agrawal, A. (1999). Accountability in decentralization: A framework with South Asian and West African cases. *The journal of developing areas*, 33(4), 473-502.
- Aristiawan, D., & Mustika, R. A. (2021). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 10(2), 315-324.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). From government decentralization to decentralized governance. *Decentralizing governance: Emerging concepts and practices*, 326, 326
- Crook, RC, & Manor, J. (1998). *Demokrasi dan desentralisasi di Asia Selatan dan Afrika Barat: Partisipasi, akuntabilitas, dan kinerja*. Cambridge University Press.
- Damyanti, A., & Ermanto, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

- Keputusan Kunjungan Wisatawan di Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 23(2), 221-234.
- Filantropi, B., & Bella, P. A. (2022). Studi Keberhasilan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism (Studi Kasus: Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta). *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 4(1), 571-584.
- Handayani, T. D., & Latifah, E. (2020). Strategi Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Berbasis Community Based Tourism (CBT). *Jurnal Sosiologi UNY*, 8(1), 1-12.
- Hermawan, H. (2016). Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal pariwisata*, 3(2), 105-117.
- Jamalina, I. A., & Wardani, D. T. K. (2017). Strategi Pengembangan ekowisata melalui konsep Community Based Tourism (Cbt) dan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di desa wisata Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 71-85.
- Perdana, A., & Mudjaningrum, P. (2017). *Desa Wisata Nglanggeran: Menuju Desa Wisata Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permana, S., & Sutrisno, H. D. (2021). Implementasi Pentahelik dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Gunungkidul. *Paradigma*, 42(2), 307-320.
- Pawl, S. (2003). Decentralization in Africa: goals, dimensions, myths and challenges. In *Public Administration and Development: Some Lessons of Experience and Policy Implications at the Woreda Level: Paper Presented to the Workshop Decentralization on and Democracy*.
- Rahmawati, E., & Mutari, A. (2018). Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Sebuah Kajian Partisipasi Masyarakat dan Dampak Ekonomi Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 23(1), 1-18.
- Ribot, J. (2002). *Democratic decentralization of natural resources: Institutionalizing popular participation*. Washington DC: World Resources Institute.
- Riyanto, E., & Amin, S. (2018). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *Neliti*, 17(2), 239-254.
- Rondinelli, D. A., & Nellis, J. R. (1986). Assessing decentralization policies in developing countries: The case for cautious optimism. Shah, A., & Thompson, T. (2004). Menerapkan tata kelola lokal yang terdesentralisasi: jalan dengan lubang, jalan memutar, dan penutupan jalan (Vol. 3353). Publikasi Bank Dunia.
- Sutrisno, S., & Rahmawati, E. (2019). *Desa Wisata Nglanggeran: Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: UNY Press